



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN LOA KULU

RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA (RANWAL) RENJA TAHUN

2025



BAB I.

PENDAHULUAN

Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kepada ALLAH Subhanallahu Wataala Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain.

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Loa Kulu dalam membina, melayani, serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang Mandiri, Sejahtera juga untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya. Diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD serta Pelayanan Kepada Masyarakat .

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Loa Kulu untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan dan tidaknya Rancangan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini, tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Loa Kulu yang nantinya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Loa Kulu.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya yang terkait serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Loa Kulu di masa yang akan datang.

Loa Kulu, 15 Maret 2024

Camat



H. ADRIANSYAH.SH

Pembina

NIP. 196810061989031006

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| PENDAHULUAN I..... | I |
| DAFTAR ISI..... | II |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 s/d 2 |
| Latar Belakang..... | 1 s/d 2 |
| 1. Landasan Hukum..... | 3 s/d 4 |
| Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 6 s/d 7 | |
| Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I s/d II Tahun 2023..... | 8 s/d 13 |
| Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 14 s/d 19 |
| Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD..... | 20 s/d 21 |
| Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 22 s/d 29 |
| Penelaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten | 30 s/d 35 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 36 s/d 37 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 38 s/d 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diamanatkan serta Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga wajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2022-2026 serta keberhasilan (*succes story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep Membangun Kabupaten dari Kecamatan yakni satu pendekatan baru yang merupakan terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing stakeholder yang ada.

1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Nomor: 22 Tahun 2023
15. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 247/SK-BUP/HK/2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
16. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-XX/BAPP/000.7.2/03/2004

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025

1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Kulu selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Loa Kulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

2. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kutai Kartanegara,

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGERA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Loa Kulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu

Lembar :

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program dan kegiatan Renja PD (2023) | Perkiraan Realisasi Capaian 2023 Target Renstra-PD s/d tahun berjalan | | | |
|------|----------|----------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------|---|---|--|-----------------|------|
| | | | | | | | Target Renja- PD Tahun (2022) | Realisasi Renja-PD tahun (2022) | Tingkat Realisasi % | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0:0 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 43,654,293,275 | 26,812,467,399.00 | 721,263,955,552.00 | 7,843,129,547.00 | 99% | 1,640,200,119,700 | 1,674,855,716,646.00 | 100% | | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 864,639,715 | 2,623,047,500.00 | 32,027,500 | 31,867,000.00 | 99% | 37,027,500 | 2,691,942,000 | 70% | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | 55,000,000 | 5,789,500.00 | 6,231,500.00 | 6,190,000.00 | 99% | 6,231,500 | 18,211,000 | 33% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | 20,000,000 | 420,775,000.00 | 0 | 0.00 | 0% | 5,000,000 | 425,775,000 | 85% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | 50,000,000 | 397,300,000.00 | 4,500,000.00 | 4,474,000.00 | 99% | 4,500,000 | 406,274,000 | 90% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 50,000,000 | 470,783,000.00 | 5,396,000.00 | 5,356,000.00 | 99% | 5,396,000 | 481,535,000 | 89% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | 50,000,000 | 481,000,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | 100% | 5,900,000 | 492,800,000 | 83% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 509,639,715 | 490,500,000.00 | 5,000,000.00 | 4,980,000.00 | 100% | 5,000,000 | 500,480,000 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 130,000,000 | 356,900,000.00 | 5,000,000.00 | 4,967,000.00 | 99% | 5,000,000 | 366,867,000 | 73% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 34,937,161,560 | 6,063,153,373.00 | 719,818,825,000.00 | 6,033,247,873.00 | 1% | 719,858,665,000 | 731,955,066,246 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia | 34,587,161,560 | 5,928,507,873 | 719,713,765,000.00 | 5,928,507,873.00 | 1% | 719,713,765,000 | 731,570,780,746 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|---|---|-------------|-------------------|----------------|----------------|------|-----------------|------------------|------|
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:01 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 | 0 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% | - | 100,000,000 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50,000,000 | 872,000.00 | 5,060,000.00 | 4,740,000.00 | 94% | 5,060,000 | 873,000 | 17% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | 300,000,000 | 133,773,500.00 | 0 | 0 | 0% | 139,840,000 | 273,613,500 | 96% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | 370,000,000 | 68,745,000.00 | 5,400,000.00 | 5,150,000.00 | 95% | 70,200,000 | 144,095,000 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:01 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 160,000,000 | 65,200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | 65,200,000 | 130,800,000 | 99% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:02 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | 210,000,000 | 3,545,000.00 | 5,000,000.00 | 4,750,000.00 | 95% | 5,000,000 | 13,295,000 | 266% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | | Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaihan | 0 | 14,706,000,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100% | 15,840,000,000 | 30,549,200,000 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | 0:01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 0 | 14,706,000,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100% | 15,840,000,000 | 30,549,200,000 | 93% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 746,535,000 | 943,425,546.00 | 204,982,500.00 | 203,786,540.00 | 99% | 627,012,972,000 | 628,160,184,086 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | 12,500,000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,485,000.00 | 99% | 2,500,000 | 7,485,000 | 299% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan | 100,000,000 | 84,546,000.00 | 44,126,140 | 44,126,140.00 | 100% | 87,628,000,000 | 87,756,672,140 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 20,400,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2,040,000,000 | 2,060,400,000.00 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 224,000,000 | 89,625,490.00 | 59,155,500 | 59,123,500.00 | 100% | 9,000,000,000 | 9,148,748,990 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | 25,000,000 | 24,999,900.00 | 12,000,000 | 11,999,900.00 | 100% | 25,000,000 | 61,999,800 | 48% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 28,500,000 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 100% | 5,500,000 | 16,300,000 | 96% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:07 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 100,000,000 | 100,000,000 | 10,200,000.00 | 10,172,000.00 | 100% | 10,172,000 | 120,344,000 | 83% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | 126,535,000 | 204,575,156.00 | 67,780,860.00 | 67,530,000.00 | 100% | 20,481,800,000 | 20,753,905,156 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------|-----------------|------------------|------|
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:09 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | 130,000,000 | 55,583,000.00 | 3,820,000.00 | 2,950,000.00 | 77% | 57,820,000,000 | 57,878,533,000 | 100% |
| | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | 355,796,000.00 | 0 | 0 | | 450,000,000,000 | 450,355,796,000 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | 1,452,000,000.00 | 1,130,726,000.00 | 0 | 0.00 | 0% | 1,452,000,000 | 2,582,726,000.00 | 78% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1,122,000,000.00 | 823,630,000.00 | 0 | 0 | 0% | 1,122,000,000 | 1,945,630,000.00 | 73% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 300,000,000.00 | 279,228,000.00 | 0 | 0 | 0% | 300,000,000 | 579,228,000.00 | 93% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:03 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 30,000,000.00 | 27,868,000.00 | 0 | 0 | 0% | 30,000,000 | 57,868,000.00 | 93% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:04 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang di perlukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:05 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 6 | 0:06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang di Rehabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 7 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 2,933,957,000 | 1,040,209,920.00 | 985,264,552 | 1,369,847,134.00 | 100% | 275,179,255,200 | 277,186,950,254 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 7 | 0:01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia | 2,000,000 | 1,989,000.00 | 2,000,000.00 | 1,989,000.00 | 99% | 2,000,000 | 5,978,000 | 99% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 7 | 0:02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | 577,500,000 | 187,617,148.00 | 150,540,000 | 149,711,184.00 | 99% | 191,869,800,000 | 192,207,128,332 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 7 | 0:03 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2,346,457,000 | 815,603,772.00 | 832,724,552 | 815,784,950.00 | 98% | 35,000,000 | 1,666,388,722 | 76% |
| | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Pemeliharaan | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 83,272,455,200 | 83,307,455,200 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 8 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | 1,175,000,000 | 237,160,060.00 | 214,256,000 | 201,181,000.00 | 94% | 375,000,000 | 813,341,060 | 21% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|--|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|------|-------------|-----------------|------|
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 8 | 0:01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | 1,050,000,000 | 237,160,060.00 | 195,746,000 | 182,731,000.00 | 93% | 250,000,000 | 669,891,060 | 68% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 8 | 0:02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan | 125,000,000 | 0 | 18,510,000.00 | 18,450,000.00 | 100% | 125,000,000 | 143,450,000 | 100% |
| | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 8 | 0:03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 1 | 0:0 8 | 0:04 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan | | 72,445,000,000 | 20,211,041,000.00 | 19,754,163,945 | 98% | 0 | 134,482,749,000 | 0% |
| | | | | | | Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 1 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 1 | 0:01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | 620,000,000 | 109,225,600.00 | 101,796,000.00 | 4,762,005.00 | 5% | 112,000,000 | 225,987,605 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 2 | 0:01 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 120,000,000 | 4,870,000.00 | 5,000,000.00 | 4,762,005.00 | 95% | 5,000,000 | 14,632,005 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 2 | 0:02 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 500,000,000 | 104,355,600.00 | 96,796,000.00 | 0 | 0% | 107,000,000 | 211,355,600 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|--|---|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------|-----------------|--------------------|------|
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 3 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | 71,825,000,000 | 73,049,465,826.00 | 20,109,245,000 | 19,749,401,940.0 0 | 98% | 134,370,749,000 | 227,169,616,766.00 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 3 | 0:01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 3 | 0:02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | 75,000,000 | 519,607,402.00 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 100% | 61,548,900,000 | 62,071,432,402.00 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 2 | 0:0 3 | 0:03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | 71,750,000,000 | 72,529,858,424.00 | 20,106,320,000 | 19,746,476,940.0 0 | 98% | 72,821,849,000 | 165,098,184,364 | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | | | PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | 95,000,000 | 40,000,000.00 | 8,230,000.00 | 9,092,378,977.00 | 100% | 40,000,000 | 9,172,378,977.00 | 29% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:0 1 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 95,000,000 | 40,000,000.00 | 8,230,000.00 | 9,092,378,977.00 | 100% | 40,000,000 | 9,172,378,977.00 | 29% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:0 1 | 0:01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | 75,000,000 | 15,000,000.00 | 8,230,000.00 | 8,230,000.00 | 100% | 15,000,000 | 38,230,000.00 | 255% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:0 1 | 0:02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 3 | 0:0 1 | 0:03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 20,000,000 | 25,000,000.00 | 9,503,140,000.00 | 9,084,148,977.00 | 96% | 25,000,000 | 9,134,148,977.00 | 56% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 820,000,000 | 258,898,200.00 | 130,000,000.00 | 129,500,000.00 | 0% | 33,727,829,100 | 33,886,227,300 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|---|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | 0:0 1 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | percentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | 820,000,000 | 258,898,200.00 | 130,000,000.00 | 129,500,000.00 | 0% | 33,497,829,100 | 33,886,227,300 | 100% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | 0:0 1 | 0:01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 4 | 0:0 1 | 0:02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 800,000,000 | 258,898,200.00 | 130,000,000.00 | 129,500,000.00 | 100% | 33,497,829,100 | 33,886,227,300 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---|--|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|-----|
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 800,000,000 | 222,789,000.00 | 130,291,000.00 | 129,245,000.00 | 0% | 230,000,000 | 582,034,000 | 97% | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 800,000,000 | 222,789,000.00 | 0 | 0 | 0% | 230,000,000 | 582,034,000 | 97% | |
| | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 800,000,000 | 222,789,000.00 | 130,291,000.00 | 129,245,000.00 | 99% | 230,000,000 | 582,034,000 | 97% | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Percentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | 90,000,000.00 | 74,900,000.00 | 28,494,791.00 | 28,390,000.00 | 100% | 75,000,000 | 178,290,000 | 38% | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:0 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | 90,000,000 | 74,900,000.00 | 28,494,791.00 | 28,390,000.00 | 100% | 75,000,000 | 178,290,000 | 38% | |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:0 1 | 0:01 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 90,000,000 | 74,900,000.00 | 28,494,791.00 | 28,390,000.00 | 100% | 75,000,000 | 178,290,000 | 38% |
| 1 | 0:0 1 | 0:0 5 | 0:0 1 | 0:02 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 23,047,458,655 | 83.317.720.605,00 | 31,301,096,343 | 30,489,093,696 | | 85,544,241,793,00 | 30,489,093,696 | 100% | |

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Kulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Loa Kulu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat rakyat. tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



abel T-C.30.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Lembaran:

| NO | Indikator*) | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra-PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nilai Sakip Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah perangkat daerah | | | 376.892.000 | 168.927.943 | 173.927.943 | 173,927,943.00 | 0 | 31,867,000.00 | 37.027.500 | 41,296,000.00 | |
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 0 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10,000,000.00 | 0 | 6,190,000.00 | 5,789,500.00 | 10,000,000.00 | |
| 2 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 420,775.000.00 | 5,000,000.00 | |
| 3 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10,000,000.00 | 0 | 4,474,000.00 | 397,300,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 4 | Jumlah Dokumen DPA SKPD | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10,000,000.00 | 0 | 5,356,000.00 | 470,783,000.00 | 5,396,000.00 | |
| 5 | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10,000,000.00 | 0 | 5,900,000.00 | 481,000,000.00 | 5,900,000.00 | |
| 6 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 0 | 93.927.943 | 103.927.943 | 103,927,943.00 | 0 | 4,980,000.00 | 490,500,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 7 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30,000,000.00 | 0 | 4,967,000.00 | 356,900,000.00 | 5,000,000.00 | |
| II | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 230.075.000 | 7.027.432.312 | 6.977.432.312 | 6,977,432,312.00 | 6.973.001.888 | 6,033,247,873.00 | 6.958.398.320 | 6,532,572,051.00 | |
| 1 | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia | | | 0 | 6.917.432.312 | 6.917.432.312 | 6,917,432,312.00 | 6.746.636.888 | 5,928,507,873.00 | 6.753.338.320 | 6,395,152,051.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 2 | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000.00 | 100,000,000 | 5060000 | |
| 3 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 230,075,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000.00 | 226,365,000 | 4,740,000.00 | 5,060,000 | 0 | |
| 4 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | | 0 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000.00 | 0 | 0 | 100,000,000 | 132,360,000.00 | |
| III | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | | 0 | 90,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 5,150,000.00 | 46,200,000.00 | 0 | |
| 1 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | | 0 | 40,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 400,000,00 | 400,000,00 | 41,200,000,00 | | |
| 2 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | | 0 | 50,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 4,750,000,00 | 4,750,000,00 | 5,000,000,00 | | |
| IV | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | | 135,190,000 | 0 | 0 | 0 | 133,650,000 | 3,200,000.00 | 0 | 0 | |
| 1 | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | | 135,190,000 | 0 | 0 | 0 | 133,650,000 | 3,200,000,00 | 0 | 0 | |
| V | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 238,830,200 | 379,307,000 | 348,307,000 | 154,307,000 | 236,392,100 | 203,786,540,00 | 316,820,000,00 | 344,536,000,00 | |
| | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,485,000,00 | 2,500,000,00 | 41,200,000,00 | |
| | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | | 143,072,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 140,844,000 | 44,126,140,00 | 25,000,000,00 | 25,000,000,00 | |
| | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | | 78,795,900 | 40,000,000 | 40,000,000 | 46,000,000 | 78,586,800 | 59,123,500,00 | 40,000,000,00 | 40,000,000,00 | |
| | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | | 16,962,300 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 16,961,300 | 11,999,900,00 | 15,000,000,00 | 14,516,000,00 | |
| | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 0 | 6,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 5,400,000,00 | 5,500,000,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | | | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 10,172.000,00 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | | | 0 | 25.307.000 | 25.307.000 | 25.307.000 | 0 | 67,530.000,00 | 25.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | | | 0 | 50.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 2,950.000,00 | 3,820.000,00 | 3,820.000,00 | |
| | Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| VI | Jumlah Barang Milik Daerah | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Mebel yang diadakan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | | 893.596,180 | 586.791,400 | 586.791,400 | 586.791,400 | 844.719,099 | 967.485,134,00 | 947.724,552 | 1,039,724,552,00 | |
| | Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1,989.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | | | 133.506,564 | 115.500.000 | 115.500.000 | 115.500.000 | 114.116,419 | 149,711,184,00 | 115.000.000 | 207.000.000,00 | |
| | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | | | 744.659,616 | 469.291,400 | 469.291,400 | 469.291,400 | 715.172,680 | 815,784,950,00 | 832.724,552 | 832,724,552,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 13.430.000 | 0 | 0 | 0 | 13.430.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII | Jumlah Barang Milik Daerah | | 687.582.000 | 315.000.000 | 215.000.000 | 215.000.000 | 373.335.000 | 201,181,000.00 | 0 | 250,000,000.00 | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | | 239.702.000 | 290.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 236.687.000 | 182,731,000.00 | 0 | 200,000,000.00 | |
| | Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan | | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 18,450,000.00 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 422.880.000 | 0 | 0 | 0 | 136.648.000 | 0 | 0 | 50,000,000.00 | |
| IX | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan | | 3.005.135.866 | 0 | 0 | 0 | 36.002.680.354 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XI | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | | 100.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 4,762,005.00 | 35.000.000 | 11,000,000.00 | |
| | Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 4,762,005.00 | 5.000.000 | 6,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 5,000,000.00 | |
| XIV | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | | 2.905.135.866 | 20.299.960.000 | 31.859.550.000 | 14.325.000.000 | 36.002.680.354 | 19,749,401,940.00 | 31.844.550.000 | 42,001,296,000.00 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | |
| | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 2,925.000.00 | 0 | 891,296,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | | 2.905.135.866 | 20.284.960.000 | 31.844.550.000 | 14.310.000.000 | 36.002.680.354 | 19,746,476,940.00 | 31.844.550.000 | 41,105,000,000.00 | |
| XIV | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | | 1.010.674.468 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 591.504.140 | 9,092,378,977.00 | 15.000.000 | 265,000,000.00 | |
| | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | 1.010.674.468 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 591.504.140 | 9,092,378,977.00 | 15.000.000 | 265,000,000.00 | |
| | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | 87.390.600 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 65.208.000 | 8,230.000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | | 923.283.868 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 526.296.140 | 9,084,148,977.00 | 0 | 250,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah | | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| XV | Percentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah Kecamatan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVI | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| XVI I | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Persentase capaian Ketenteraman dan Keteriban Umum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000.00 | |
| XVI II | Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | | | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28,390,000.00 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| XIX | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | | | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28,390,000.00 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28,390,000.00 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 27.434.683.130 | 23,965,538,655.00 | 23.122.458.655 | 38.798.839.693 | 30.489.093.696 | 40.627.914.663 | 23.122.458.655 | | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor CamatLoa Kulu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
 - a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
 - a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kedudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
 - b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
 - c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka singkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadilokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.Niaga Mas gemilang yang berlokasi di desa Jonggon dan PT Kota Bangun Play station yang berlokasi di Desa Sungai Payang Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah dan padi ladang di desa hampir disemua 15 Desa.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini

Tabel TC. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Loa Kulu

Lembar :dari.....

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|----------|---|----------------|--------------------------|---|----------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) 2025 | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Loa Kulu | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 74 | 8.222.628.603 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Loa Kulu | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 74 | - | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | 178,927,943.00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 10,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 103,927,943 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 103,927,943.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|-----------|------------------|---|----------|---|-----------|------------------|--|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 25,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 6,813,338,320.00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Loa Kulu | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia | 1 Dokumen | 6,753,338,320.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Loa Kulu | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang | 1 Dokumen | 7,983,762,153.00 | Gaji dan TPP (Data Tahun 2024) |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | - | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | 4 Dokumen | 50,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | 4 Dokumen | 146,880,000.00 | Honor PA,PPK dan Bendahara, menyesuaikan SSH |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | | 81,200,000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Dokumen | 41,200,000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Dokumen | 64,800,000.00 | Menyesuaikan SSH Honor Pengguna Barang |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | 1 Dokumen | 40,000,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | 1 Dokumen | 40,000,000.00 | |
| | Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaiannya | | 0 | Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaiannya | | 0.00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Loa Kulu | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 0 | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Loa Kulu | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 0 | 0.00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 136,820,000.00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---------------|---------------|--|----------|--|---------------|----------------|---|
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | Pengadaan Lampu Philip,Baterai besar dan kecil |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan | 2 Unit | 25,000,000.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan | 2 Unit | 100,000,000.00 | Pengadaan Prenter,Scanner, Laktop, dan Hardisk Eksternal |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Loa Kulu | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | - | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Loa Kulu | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0.00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Loa Kulu | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 40 Jenis | 40,000,000.00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Loa Kulu | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 35 Jenis | 250,000,000.00 | Pengadaan Perlengkapan Cetak KTP EL (Rp.50.000.000) Pengadaan ATK (50.000.000) Alat kebersihan (50.000.000) Makan Minum Rapat 50.000.000.dan makan Minum tamu 50.000.000. |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Loa Kulu | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | 2500 Lembar | 15,000,000.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Loa Kulu | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | 2500 Lembar | 30,100,000.00 | Kekurangan Anggaran Biaya Foto Copy Rutin |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Loa Kulu | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedia Perundang-Undangan | 720 Eksemplar | 5,500,000.00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Loa Kulu | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 720 Eksemplar | 5,500,000.00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Loa Kulu | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 50 Kali | - | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Loa Kulu | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 50 Kali | 50,000,000.00 | Pengadaan Makan Minum Kunjungan Tamu |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | 40 Kali | 25,000,000.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | 40 Kali | 525,000,000.00 | SPPD Dalam Daerah 200.000.000. SPPD Luar Daerah 325.000.000. |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | 100 Dokumen | 3,820,000.00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | 100 Dokumen | 20,000,000.00 | SPPD, Foto Copy, Penjilidan dan Makan Minum Rapat |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 30 Kegiatan | 20,000,000.00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 30 Kegiatan | 20,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------------|-----------------------|---|----------|--|-------------|----------------|--|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | 100 | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | 100 | | |
| | Pengadaan Mebel | Loa Kulu | Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan | 0 | 0 | Pengadaan Mebel | Loa Kulu | Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan | 0 | 150,000,000.00 | Banyaknya Meja Kursi Kantor Yang sudah Rusak |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan | 0 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan | 0 | 0.00 | |
| | | Loa Kulu | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan | 0 | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan | 0 | 0.00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi | 0 | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi | 0 | 0.00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Loa Kulu | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 100 | 469,291,400.00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Loa Kulu | Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia | 600 Lembar | 2.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Loa Kulu | Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia | 600 Lembar | 2,000,000.00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Loa Kulu | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | 72 Rekening | 115.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Loa Kulu | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | 72 Rekening | 248,400,000.00 | Biaya Jaringan Listrik 9 Rekening, Jaringan Internet 6 rekening , Rekening Air 2 Rekening |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 361 Orang | 469,291,400.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 361 Orang | 832,724,552.00 | Kekurangan Anggaran Honor Non PNS (THL) |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15 | 20,000,000.00 | Kurang Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Loa Kulu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | 8 Unit | 190.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Loa Kulu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | 8 Unit | 200,000,000.00 | Kurang Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|--|---|--|---|----------------|--|--|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan | 5 Unit | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan | 5 Unit | 50,000,000.00 | Pemeliharaan,AC ,Komputer,Printer dan Laptop |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | - | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0.00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Loa Kulu | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan | 0 | 0 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Loa Kulu | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan | 0 | 0.00 | | |
| | Loa Kulu | Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | | Loa Kulu | Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan | 0 | 0.00 | | |
| | | Loa Kulu | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | 0 | 0 | | Loa Kulu | Pertumbuhan Pendapatan Asli | 0 | 0.00 | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0.00 | | |
| | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | 0.00 | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada | Loa Kulu | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | | 10,000,000.00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada | Loa Kulu | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | | | | |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 1 Laporan | 5,000,000.00 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 0 | 100,000,000.00 | Evaluasi Hasil IKM dan Tindak Lanjut pelaksanaan IKM yang telah berjalan,belanja Makan Minum Rapat,Meja,Kursi dan PC | |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 15 | 5,000,000.00 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 15 | 10,000,000.00 | Anggaran Biaya Survey Kepuasan IKM | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan | Loa Kulu | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | | 14,335,000,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Loa Kulu | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--------------|----------------------|---|----------|---|-----------|-------------------|
| | kepada Camat | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Loa Kulu | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 0 | 10,000,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Loa Kulu | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 0 | 10,000,000.00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Loa Kulu | Percentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | 1 Kegiatan | 15,000,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Loa Kulu | Percentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | 0 | 2,606,575,000.00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Loa Kulu | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | 170 kegiatan | 14,310,000,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Loa Kulu | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | 1 Laporan | 14,390,000,000.00 |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Loa Kulu | Percentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | | 65,000,000.00 | PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Loa Kulu | Percentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | 65,000,000.00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Loa Kulu | Percentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | 100 Orang | 15,000,000.00 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Loa Kulu | Percentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | 100 Orang | 25,000,000.00 |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 0 | 50,000,000.00 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 0 | 50,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|----------------|--|----------|--|----------|----------------|---|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Loa Kulu | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | 0 | 0 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Loa Kulu | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | 0 | 0.00 | |
| Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | | Loa Kulu | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 0.00 | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Loa Kulu | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Loa Kulu | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan di wilayah Kecamatan | 0 | 135,194,291.00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan di wilayah Kecamatan | 0 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 5,000,000.00 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 5,000,000.00 | |
| | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 | 130,194,291.00 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 | 280,000,000.00 | Tambahan Biaya Makan Minum , Pakaihan dan Uang Saku |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 0 | 0 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 0 | 0.00 | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Loa Kulu | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 130,000,000.00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Loa Kulu | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|----------------|---|----------|---|------------|--------------------------|---|
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Loa Kulu | Percentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 kegiatan | 130,000,000.00 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Loa Kulu | Percentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 kegiatan | 280,000,000.00 | Kekurangan Anggaran Tambahan Makan Minum Paskib, Pakaian dan Uang Saku |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Loa Kulu | Percentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | 0 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Loa Kulu | Percentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | 0 | 0.00 | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | 0 | 25,000,000.00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | 0 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | 25,000,000.00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | 75,000,000.00 | Kekurangan Anggaran Transportasi Turun ke Lapangan dalam rangka Pendampingan ke 15 Desa |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | 0.00 | |
| 23.047.458.655 | | | | | | | | | 28,769,669,648.00 | |

4. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follows function*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara -sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan

Tabel (nomor sesuai kebutuhan)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|----|---|----------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Loa Kulu | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | 2 Dokumen | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | 1 Dokumen | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 1 Dokumen | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Loa Kulu | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | 1 Dokumen | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Loa Kulu | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia | 1 Dokumen | |
| 9 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1 Dokumen | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------|--|---------------|--|
| '12 | Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik DaerahPada SKPD | 1 Dokumen | |
| '13 | Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD | Loa Kulu | Jumlah Laporan Barang Milik DaerahPada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | 1 Dokumen | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Loa Kulu | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | | |
| 14 | Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya | Loa Kulu | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 60 Stel | |
| 5 | Administrasi Umum PerangkatDaerah | Loa Kulu | Jumlah layanan AdministrasiUmum Perangkat Daerah | | |
| 15 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | 1 Dokumen | |
| 16 | Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Perlengkapanyang diadakan | 2 Unit | |
| 17 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Loa Kulu | Jumlah Penyediaan PeralatanRumah Tangga | 20 Jenis | |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Loa Kulu | Jumlah Bahan Logistik Kantor YangTersedia | 35 Jenis | |
| 19 | Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan | Loa Kulu | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | 2500 Lembar | |
| 20 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Loa Kulu | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 720 Eksemplar | |
| 21 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Loa Kulu | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 50 Kali | |
| 22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD | Loa Kulu | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | 40 Kali | |
| 23 | Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD | Loa Kulu | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | 100 Dokumen | |
| 24 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD | Loa Kulu | Jumlah data Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD | 30 Kegiatan | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | 0 | |
| 25 | Pengadaan Mebel | Loa Kulu | Jumlah Mebel yang diadakan | 2 Set | |

| | | | | | |
|----|--|----------|--|-------------|--|
| 26 | Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya | Loa Kulu | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | | |
| 27 | Pengadaan Gedung Kantor atauBangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yangdiadakan | 1 Unit | |
| 28 | Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi | 1 Unit | |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | |
| 29 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Loa Kulu | Jumlah Surat Menyurat YangTersedia | 600 Lembar | |
| 30 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik | Loa Kulu | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik YangDisediakan | 72 Rekening | |
| 31 | Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan JasaPelayanan Umum | 361 Orang | |
| 32 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatandan Perlengkapan Kantor | 3 Unit | |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Loa Kulu | Jumlah Barang Milik Daerah | | |
| 33 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan | Loa Kulu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan | 8 Unit | |
| 34 | Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya | Loa Kulu | Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnyayang mendapat Pemeliharaan | 5 Unit | |
| 35 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya | 1 Unit | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK | Loa Kulu | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan | 0 | |
| | | Loa Kulu | Tingkat Aksesibilitas WilayahKecamatan | 0 | |
| | | Loa Kulu | Pertumbuhan Pendapatan AsliDesa | 0 | |
| 9 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 0 | |
| 36 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait | Loa Kulu | Jumlah kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | 15 Kegiatan | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|---|--------------|--|
| 10 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada | Loa Kulu | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | | |
| 37 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 1 Laporan | |
| 38 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 15 Kegiatan | |
| 39 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 15 Kegiatan | |
| 11 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat | Loa Kulu | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | | |
| 40 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Loa Kulu | Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 15 Laporan | |
| 41 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Nonperizinan | Loa Kulu | Persentase pelayanan perijinan dannon perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | 15 Laporan | |
| 42 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan | Loa Kulu | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | 170 kegiatan | |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Loa Kulu | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | | |
| 12 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Loa Kulu | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Loa Kulu | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan | 100 Orang | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 3 Lembaga | |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Loa Kulu | persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | 15 Kegiatan | |
| | | Loa Kulu | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15 Kegiatan | |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM | Loa Kulu | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | |

| | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|--|
| 13 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | percentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15 Kegiatan | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Loa Kulu | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 kegiatan | |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Loa Kulu | Percentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | 0 | |
| 14 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Loa Kulu | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Loa Kulu | Percentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 kegiatan | |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Loa Kulu | Percentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | 0 | |
| 15 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | 0 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | |
| | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Loa Kulu | Percentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | |

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow function*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;

2. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur; Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional serta juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu telah sesuai dengan kebijakan Kabupaten yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2022 s/d 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2023, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat administrasi yang benar dan akurat
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan profesional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Sasaran :

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yangdigunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Loa Kulu, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat pemakai jasa layanan Masyarakat
2. Terwujudnya kepuasan Masyarakat sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme.
4. Meningkatnya jasa layanan kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.
5. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan Masyarakat

3. Program dan Kegiatan

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu

lembar 1 dari 6

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Loa Kulu | 100 | 10,968,094,648.00 | APBD | | 100 | 8,172,458,655.00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Loa Kulu | 100 | 178,927,943.00 | APBD | | 100 | 168,927,943.00 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | Loa Kulu | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 2 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 0 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Loa Kulu | 2 Dokumen | 103,927,943.00 | APBD | | 2 Dokumen | 103,927,943.00 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Loa Kulu | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Loa Kulu | 100 | 8,140,642,153.00 | APBD | | 100 | 6,977,432,312.00 |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia | Loa Kulu | 1 Dokumen | 7,983,762,153.00 | APBD | | 1 Dokumen | 6,917,432,312.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|--|---------------|-----------------------|
| 9 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 0 | APBD | | 1 Dokumen | 0 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 146,880,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Loa Kulu | 100 | 104,800,000.00 | APBD | | 100 | 70,000,000.00 |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Loa Kulu | 1 Dokumen | 64,800,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 30,000,000.00 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan | Loa Kulu | 1 Dokumen | 40,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 40,000,000.00 |
| 4 | Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaiian | Loa Kulu | 100 | | APBD | | 100 | 0 |
| 14 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Loa Kulu | 60 Stel | 0 | APBD | | 0 | 0 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Loa Kulu | 100 | 1,040,600,000.00 | APBD | | 100 | 154,307,000.00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik (Unit) | Loa Kulu | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 2,500,000.00 |
| 16 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan | Loa Kulu | 2 Unit | 100,000,000.00 | APBD | | 2 Unit | 25,000,000.00 |
| 17 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Loa Kulu | 30 Jenis | 0 | APBD | | 30 Jenis | 0 |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | Loa Kulu | 35 Jenis | 250,000,000.00 | APBD | | 35 Jenis | 46,000,000.00 |
| 19 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia | Loa Kulu | 2500 Lembar | 30,100,000.00 | APBD | | 2500 Lembar | 5,000,000.00 |
| 20 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Loa Kulu | 720 Eksemplar | 5,500,000.00 | APBD | | 720 Eksemplar | 5,500,000.00 |
| 21 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | Loa Kulu | 50 Kali | 50,000,000.00 | APBD | | 50 Kali | 25,000,000.00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara | Loa Kulu | 40 Kali | 525,000,000.00 | APBD | | 40 Kali | 25,307,000.00 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan | Loa Kulu | 100 Dokumen | 50,000,000.00 | APBD | | 100 Dokumen | 20,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Loa Kulu | 30 Kegiatan | 20,000,000.00 | APBD | | 30 Kegiatan | 0 |
| 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | Loa Kulu | 100 | 150,000,000.00 | APBD | | 100 | 0 |
| 25 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | Loa Kulu | 5 Set | 150,000,000.00 | APBD | | 5 Set | 0 |
| 26 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang di perlihara | Loa Kulu | 5 Unit | 0 | APBD | | 5 Unit | 0 |
| 27 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan | Loa Kulu | 1 Unit | 0 | APBD | | 1 Unit | 0 |
| 28 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi | Loa Kulu | 15 Unit | 0 | APBD | | 15 Unit | 0 |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Loa Kulu | 100 | 1,103,124,552.00 | APBD | | 100% | 586,791,400.00 |
| 29 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia | Loa Kulu | 600 Lembar | 2,000,000.00 | APBD | | 600 Lembar | 2,000,000.00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | Loa Kulu | 72 Rekening | 248,400,000.00 | APBD | | 72 Rekening | 115,500,000.00 |
| 31 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Loa Kulu | 361 Orang | 832,724,552.00 | APBD | | 361 Orang | 469,291,400.00 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Loa Kulu | 20 Unit | 20,000,000.00 | APBD | | 0 | 0 |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | Loa Kulu | 100 | 250,000,000.00 | APBD | | 100% | 215,000,000.00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | Loa Kulu | 8 Unit | 200,000,000.00 | APBD | | 8 Unit | 190,000,000.00 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan | Loa Kulu | 5 Unit | 50,000,000.00 | APBD | | 5 Unit | 25,000,000.00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Loa Kulu | 1 Unit | 0 | APBD | | 0 | 0 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan | Loa Kulu | 100 | 17,116,575,000.00 | APBD | 100 | 100 | |
| | | Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | 15 | 50 | APBD | 15 | 100 | |
| | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Loa Kulu | 5 | 5 | APBD | 5 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------|-------------|--------------------------|------|--|--------------|--------------------------|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | Loa Kulu | 100 | 0 | APBD | | 100 | 0 |
| 36 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 0 | APBD | | 15 Kegiatan | 0 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | Loa Kulu | 100 | 110,000,000.00 | APBD | | 100 | 120,000,000.00 |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 100,000,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 20,000,000.00 |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 10,000,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 100,000,000.00 |
| 13 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Loa Kulu | 100 | 17,006,575,000.00 | APBD | | 100 | 14,325,000,000.00 |
| 39 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 10,000,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 0 |
| 40 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 2,606,575,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 15,000,000.00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | Loa Kulu | 12 kegiatan | 14,390,000,000.00 | APBD | | 170 kegiatan | 14,310,000,000.00 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Loa Kulu | 100 | 175,000,000.00 | APBD | | 100 | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | 100 | 175,000,000.00 | APBD | | 100 | 15,000,000.00 |
| 41 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Loa Kulu | 100 Orang | 25,000,000.00 | APBD | | 100 Orang | 15,000,000.00 |
| 42 | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 150,000,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 0 |
| 43 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 0 | APBD | | 15 Kegiatan | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| 44 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Loa Kulu | 0 | 0 | APBD | | 0 | 0 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | 100 | 330,000,000.00 | APBD | | 100 | |
| 15 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Loa Kulu | 100 | 330,000,000.00 | APBD | | 100 | 205,000,000.00 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | 15 Kegiatan | 50,000,000.00 | APBD | | 15 Kegiatan | 5,000,000.00 |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | 2 Kegiatan | 280,000,000.00 | APBD | | 2 Kegiatan | 200,000,000.00 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Loa Kulu | 100 | 280,000,000.00 | APBD | | 100 | |
| 16 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Loa Kulu | 2 Kegiatan | 280,000,000.00 | APBD | | 2 Kegiatan | 200,000,000.00 |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Loa Kulu | 2 kegiatan | 280,000,000.00 | APBD | | 2 kegiatan | 200,000,000.00 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Loa Kulu | 100 | 75,000,000.00 | APBD | | 100 | |
| 17 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan | Loa Kulu | 100 | 75,000,000.00 | APBD | | 100 | 10,000,000.00 |
| 46 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | 15 Desa | 75,000,000.00 | APBD | | 15 Desa | 10,000,000.00 |
| | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Loa Kulu | 15 Desa | 0 | APBD | | 0 | |
| | | | | | 28,944,669,648.00 | | | | 23,047,458,655.00 |

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 05 Maret 2024

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Kecamatan Loa Kulu

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|--|------------|--------------------|
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 1. Pembersihan Bahu Jalan Margahayu Menuju Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 2. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 3. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang | | 4. Pembersihan Bahu Jalan Desa Sungai Payang Menuju Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|--|------|------------|--------------------|
| | berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | | | | | | | |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 5. Pembersihan Bahu Jalan Desa Loh Sumber Menuju Jembayan Dalam | | Rp 200,000,000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 6. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jembayan Dalam Menuju Sungai Payang | | Rp 200,000,000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 7. Pembersihan Bahu Jalan Desa Margasari Menuju Sungai Payang | | Rp 200,000,000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 8.Pembersihan Bahu Jalan Desa Jongkang Menuju Datar Rawa Desa Loa Kulu Kota | | Rp 200,000,000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------|--|------|--|------------|--------------------|
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Mulyo Pranoto | | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Loa Kulu Kota | | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Sepakat | | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 1. Pembersihan Bahu Jalan Margahayu Menuju Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 2. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|------|--|------------|--------------------|
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 3. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon 4. Pembersihan Bahu Jalan Desa Sungai Payang Menuju Jonggon Jaya | | Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 5. Pembersihan Bahu Jalan Desa Loh Sumber Menuju Jembayan Dalam | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 6. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jembayan Dalam Menuju Sungai Payang | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas | | 7. Pembersihan Bahu Jalan Desa Margasari Menuju Sungai Payang | | Rp 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-------|----------------|--|----------------|--------------|--|
| | dan menjaga lebar Jalan | | | | | | | | |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pembersihan rutin Bahu Jalan Penghubung antar Desa untuk menjaga jarak pandang berlalu lintas dan menjaga lebar Jalan | | 8.Pembersihan Bahu Jalan Desa Jongkang Menuju Datar Rawa Desa Loa Kulu Kota | | Rp 200,000,000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Mulyo Pranoto | | 220.000.000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Loa Kulu Kota | | 220.000.000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) | Perlunya Pengangkatan Sedimentasi Lumpur pada saluran drainase Kecamatan sebagai pengendalian banjir | | Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Sepakat | | 220.000.000 | | APBD | Disepakati | Kecamatan Loa Kulu |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Parit Yang ada belum layak sehingga di khawatirkan akan merusak badan jalan | RT 009 Donomulyo | Semenisasi Parit pinggir jalan RT 009 | 600 M | 150,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal ada | Kecamatan Loa Kulu dan Dinas Perumahan dan Pemukiman |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------|--|----------------------------|----------------|------|------------|
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | | LOA KULU KOTA | LANJUTAN PEMBUATAN PARIT PASANGAN DEPAN MASJID MENUJU MUHAMADIYAH RT.15 | 200 M | 200,000,000 | | APBD KABUPATEN | | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | | LOA KULU KOTA | PEMBUATAN PARIT PASANGAN SAMPING POLSEK LOA KULU RT.08 | 200 M | 200,000,000 | | APBD KABUPATEN | | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Sering terjadi banjir dimusim penghujan | RT 03 Selingsing Desa Jembayan Tengah | Pembangunan Saluran Drenase Jln Bengkuang | 150 m | 220.000.000 (<i>Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah</i>) | 0.551452 ° 116.9761 22° | APBD Kabupaten | SIPD | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Parit yang ada tidak Memadai | Jembayan Dalam | Pembuatan Parit Drainase Jalan | 1 paket | 220.000.000 | | APBD | | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air belum ada | Ponoragan RT 01 | Lanjutan pembuatan paret LDII/Suyud | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Parit depan langgar rusak dan perlu direhab | Ponoragan RT 02 | Rehab Parit Depan Langgar Nurus Sidiq | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran parit banyak tersumbat | Ponoragan RT 02 | Pembuatan Parit Gang Taslim | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Parit banyak yang tersumbat | Ponoragan RT 02 | Normalisasi Parit Suyadi (Alat Berat) | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Parit banyak yang yang rusak | Ponoragan RT 02 | Lanjutan Parit Tamsir | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|--|---------|-------------|--|------|--|------------|-----------|
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | Rehab Parit Samping Rumah Pak Sugianto (DURKP) Lanjutan Semenisasi Parit Samping Rumah Pak Jumeri (DURKP) | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | Lanjutan Semenisasi Parit Samping Rumah Pak Jumeri (DURKP) | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | Rehab saluran irigasi Jln Poros | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | Semenisasi Parit Batas Desa Ponoragan - Sumbersari | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | Penyempurnaan parit Pembuangan SDN 009 | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 06 | PEMBUATAN DRAINASE | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 02 | NORMALISASI PARIT BUNTUNG RT 02 DESA PONORAGAN | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 02 | PEMBUATAN PARIT PASANGAN JL. RAPAK PANJANG RT 002 DESA PONORAGAN | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 06 | PEMBUATAN PARIT PASANGAN JL. MANUNGGAL RT 006 DESA PONORAGAN | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Parit kurang maksimal | Ponoragan RT 04 | NORMALISASI PARIT RT 004 DESA PONORAGAN | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|-----------------------|--|------|--|------------|-----------|
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <i>sarana Dan Prasarana Draenase</i> | <i>Desa Jongkang</i> | <i>Pembutan Parit Kelompok tani Turap turap Beton</i> | | <i>Rp 200,000,000</i> | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <i>sarana Dan Prasarana Draenase</i> | <i>Desa Jongkang</i> | <i>Pembuatan parit pasang jln Kendiwah</i> | | <i>Rp 200,000,000</i> | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <i>sarana Dan Prasarana Draenase</i> | <i>Desa Jongkang</i> | <i>Lanjutan Pembutan parit jln SMPN 06</i> | | <i>Rp 200,000,000</i> | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <i>sarana Dan Prasarana Draenase</i> | <i>Desa Jongkang</i> | <i>Pasangan batu parit Pembuangan Kelompok Tani RT 3</i> | | <i>Rp 250,000,000</i> | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <i>sarana Dan Prasarana Draenase</i> | <i>Desa Jongkang</i> | <i>Pasangan batu parit Pembuangan Kelompok Tani RT 4</i> | | <i>Rp 250,000,000</i> | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Penurunan Kualitas Jembatan | Desa Sumbet Sari RT.03 | Lanjutan Rehab Boxculvert Jalan Amat Khasim | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | PERLU ADANYA PEMBUATAN DRAINASE BETON | RT 10 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | PERLU ADANYA PEMBUATAN DRAINASE BETON | 200 m | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | PERLU ADANYA NORMALISASI SALURAN DRAINASE | RT 10 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | PERLU ADANYA NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 1 km | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | PERLUNYA ADANYA PEMBANGUAN | RT 10- 11 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | PERLUNYA ADANYA PEMBANGUAN | 1 paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|---------------|--|----------------|--------------|------------|-----------|
| | | ra | | | | | | | | |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | PERLU NYA DI BANGUN DRAINASE | RT 11 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | PERLU NYA DI BANGUN DRAINASE | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | BELUM ADANYA PEMBANGUNAN | RT 12 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | BELUM ADANYA PEMBANGUNAN | 1 Paket | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | KONDISI SAATINI PERLU DI BANGUN DRAINASE | RT 16 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | KONDISI SAATINI PERLU DI BANGUN DRAINASE | 250 m | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | PERLU ADANYA PEMBANGUNAN DRAINASE P. 200 m x La. 65 cm x Lb 35 cm | RT 16 DESA JONGGON JAYA, Kab. Kutai Kartanegara | PERLU ADANYA PEMBANGUNAN DRAINASE P. 200 m x La. 65 cm x Lb 35 cm | 250 m | 220.000.000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Drainase jalan lingkungan (beton/pasangan batu) | Mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan di kawasan pemukiman | Desa Loh Sumber | Pembuatan gorong2 | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|---------|---------------|--|----------------|--------------|------------|-----------|
| Normalisasi jalan drainase lingkungan kecamatan dan kelurahan | Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki tata air alami dari suatu saluran air berupa kebersihan | Desa Loh Sumber | Normalisasi parit | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.01 Desa Loh Sumber | Parit Lanjutan Dari Rumah Pak Gunawan Ke Belakang Rumah Pak Aris | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.02 Desa Loh Sumber | Parit Lanjutan Sampai Parit Besar Gang Mawar | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.03 Desa Loh Sumber | Pembuatan Parit Cacing Menuju Parit Besar | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.03 Desa Loh Sumber | Lanjutan Parit Pasangan | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.04 Desa Loh Sumber | Lanjutan Parit | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.05 Desa Loh Sumber | Pembuatan Parit Gang 1 Ke Parit Besar | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Sarana Prasarana Mobilitas Penduduk | Rt.06 Desa Loh Sumber | Semenisasi Gang | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.06 Desa Loh Sumber | Pembangunan Parit Pasangan | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|---------|--|---------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.06 Desa Loh Sumber | Pembangunan Parit Dari Rumah (Alm) Minem Sampai Rumah Budi Laksono Pembuatan Parit Depan Langgar Menuju Rumah Pak Sari | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan) | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.08 Desa Loh Sumber | | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi saluran drainase lingkungan kecamatan dan kelurahan/desa di kecamatan loa kulu | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | Rt.09 Desa Loh Sumber | Normalisasi Parit Sumber Rezeki | 1 Paket | Rp200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | LOA KULU KOTA | LANJUTAN PEMBUATAN PARIT PASANGAN DEPAN MASJID MENUJU MUHAMADIYAH RT.15 | 200 M | 200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Loa Kulu | Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir | LOA KULU KOTA | PEMBUATAN PARIT PASANGAN SAMPING POLSEK LOA KULU RT.08 | 200 M | 200,000,000 | | APBD Kabupaten | Proposal Ada | Disepakati | Kecamatan |
| Normalisasi Saluran Gorong-gorong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air sering tersumbat | RT 004 Al-Hidayah Desa Jembayan Tengah | Pembuatan saluran Gorong-Gorong Jln Al-Hidayah | 1 Paket | 220.000.000(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) | 0.553153° 116.96282 | APBD Kabupaten | SIPD | | Kecamatan Loa Kulu |
| Normalisasi Saluran Gorong-gorong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Saluran air Tidak Lancar | RT 010 Tudungan Desa Jembayan Tengah | Pembangunan Saluran Gorong-gorong Jln.Tudungan | 1 Paket | 220.000.000(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) | 0.539652 116.949627 | APBD Kabupaten | SIPD | | Kecamatan Loa Kulu |
| Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana | | LOA KULU KOTA | PEMBUATAN TURAP GG.USAHA TANI RT.23 | 200 M | 200,000,000 | | APBD KABUPATEN | | | Kecamatan Loa Kulu |

| Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana | | LOA KULU KOTA | PEMBUATAN TURAP JL. PADAT KARYA TANI RT.15 | 200 M | 200,000,000 | | APBD KABUPATEN | | | Kecamatan Loa Kulu |
|--|---|---|--|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------|
| Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Jalan yang kurang lebar dan kurang tinggi membuat warga kesulitan dalam berkendara dan disaat hujan membuat jalan menjadi banjir karena kurang tinggi | Jalan Ahmad Yani,Gang Putri RT 5 Desa Sepakat | Peningkatan semenisasi gang putri | 5Mx100 M | Rp,200.000.000 (Dua Ratus Juta) | Lat- 0.509651' Long 117.0240 54' | APBD | Proposal | Disepakati | Kecamatan |
| Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Belum adanya pengerasan dan semenisasi digang Walet , membuat warga yang bermukim di dalamnya sulit melewati karena bila hujan jalan becek. | Jalan Rapak Nyamuk RT 1 Desa Sepakat | Pengerasan dan Semenisasi jalan Gang Walet | 4Mx100 M | Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta) | Lat- 0.494235 Long 117.0220 24' | APBD | Proposal | Disepakati | Kecamatan |
| Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Belum adanya pengerasan dan semenisasi digang Walet , membuat warga yang bermukim di dalamnya sulit melewati karena bila hujan jalan becek. | Jalan S.Parman RT 3 Desa Sepakat | Pengerasan dan Semenisasi jalan Gang Penumpukan Kayu | 4Mx100 M | Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta) | Lat- 0.498464 Long 117.0227 1' | APBD | Proposal | Disepakati | Kecamatan |
| Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | | LOA KULU KOTA | PENINGKATAN WILAYAH EKS.KAYU MAS | 1 PAKET | 200,000,000 | | APBD KABUPATEN | Proposal | Disepakati | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---------|-------------|--|------|--|------------|-----------|
| Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | | RT 012 Rempanga | Rehab Jembatan Besi Penyebrangan Kekuburan Muslimin RT 12 | 1 Paket | 200,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |
| Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa | | RT 003 Sentuk | Semenisasi jembatan gang Langgar | 1 Paket | 150,000,000 | | APBD | | Disepakati | Kecamatan |

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Loa Kulu Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Kulu.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Loa Kulu.

Demikian pula dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapan terima kasih dengan tersusunnya, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Loa Kulu, 18 Maret 2024

Camat Loa Kulu



H. ADRIANSYAH.SH

Pembina
NIP. 196810061986031006

